**PENERAPAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR OLEH ORANG
TUA LAKI-LAKI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh : *Tria Ismina*

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi S.H.,M.,H

Pembimbing II : Ulfia Hasanah S.H.,M.,Kn

Alamat: Jalan Tanjung Jaya Gg Jaya Nomor 9

Email: tria11yaya@gmail.com

ABSTRACT

In the household there must be a conflict that can be settled between the husband and wife wisely. This conflict can manifold appear as if the wife feels the husband is unable to meet the needs of his wife or the husband feels the wife can not perform his duties properly or because of other matters. Discuss the issue of divorce is certainly not much discussion of child custody. Often between men and women there is a struggle for child custody. But the provisions on custody of underage children will be under the care of his mother.

Researchers want to study and answer the problem about how the application of custody of underage children by the parents of men according to Compilation of Islamic Law? What is the basis of judges' consideration in imposing custody of a child to a male parent based on Decision Number 0177 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr? Are the rights and obligations of the underage child already fulfilled by divorced parents?

The method that writer use is method of sociological approach with collecting data as follows: literature study, document study, and interview.

The results of research and discussion can be concluded that Here, custody of underage children who fall to the parents of men or father to look back kemaslahatan child and for good development in the child so as not to imitate his mother's behavior later. The judge considers that underage child custody may be to a male parent if, in the hearing, the man can provide the actual information that occurs during their marriage, such as the woman often abandons her child, does not care and does not caring for the child. Despite having been separated from the father of the child, the mother keeps paying attention in terms of education and gives affection and attention to his child, teaches and gains good knowledge.

From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the application of the provision of custody of underage children by the parents of men in the Religious Court of Pekanbaru according to the Compilation of Islamic Law determines that the child who has not determined that the child who has not mumayyiz or not yet 12 years is the right for the mother to maintain it, while if the child already mumayyiz, he can choose between his father or mother to act as the keeper. But there are several reasons that make the mother lose custody of her child even if still under age, can be because the mother does not care about her child under any circumstances, do not take care and keep her child as good as possible, do acts of violence and ignore all requirement of child. Secondly, from the data obtained by the author in the Religious Court of Pekanbaru, previously there was no decision that imposed the custody of the underage child to the male parents other than the verdict in Number 0177 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr. This is due to the judge's consideration in childcare and the seriousness of both parents in parenting. Suggestion, Parents who have broken up or divorced should still pay attention and provide affection without shortage to the child, especially the child is still under age who still need the attention of both parents.

Keywords: *Divorce-Child Rights-Compilation of Islamic Law*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.³ Dalam rumah tangga tentunya pasti ada konflik yang bisa diselesaikan antara suami isteri tersebut secara bijak. Konflik ini bisa bermacam-macam muncul seperti sang isteri merasa sang suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istrerinya atau sang suami merasa isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik ataupun karena perihal lain.⁴

Konflik ini terkadang berujung perceraian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-

Undang.⁵ Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Perkawinan dapat putus karena⁶ :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Akta keputusan pengadilan.

Pengadilan Agama Pekanbaru penulis mendapat informasi mengenai angka perceraian yang terus meningkat, seperti tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Angka Perceraian
1	2014	1.129
2	2015	1.232
3	2016	1.259

Membahas masalah mengenai perceraian tentunya tidak jauh pembahasan mengenai hak asuh anak. Sering kali antara pihak lelaki dan pihak perempuan terjadi perebutan hak asuh terhadap anak. Tetapi ketentuan mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur akan berada dibawah asuhan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian⁷ :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mummyyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan bahwa hak asuh anak setelah perceraian akan jatuh ke ibu atau bapak nya, tetapi dijelaskan mengenai kuasa asuh. Kuasa asuh adalah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta:2007, hal 46.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 3.

⁴ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta:2000, hal 28

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 207.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya.⁸

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a dengan Pasal 47 ayat (1). Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan didalam penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memutuskan. Secara terminologisnya, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya.

Sebagai salah satu contoh hak asuh anak yang masih dibawah umur yang jatuh ke pihak orang tua laki-laki yaitu pada Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr dimana anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu jatuh kepada ayahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai adanya penelitian tentang **“Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Laki-Laki Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh orang tua laki-laki menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak

kepada orang tua laki-laki berdasarkan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?

3. Apakah hak dan kewajiban anak dibawah umur sudah dipenuhi oleh orang tua yang telah bercerai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh orang tua laki-laki di Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada orang tua laki-laki berdasarkan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr.
- c) Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak dibawah umur sudah dipenuhi oleh orang tua yang telah bercerai

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai sah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis maupun pembaca dari penelitian penulisan ini dalam hal penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh orang tua laki-laki di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata secara khusus terutama dalam hal hak asuh anak yang masih dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam.
- d) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama dalam hal penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh orang tua laki-laki kompilasi hukum islam.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Asuh Anak

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut haddanah yang mengandung arti merawat dan

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 11.

mendidik anak yang belum mumayiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di persoalan hak.⁹ Hadhanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Standar untuk menemukan bahwa orang tua menjalankan hak asuransinya pada saat melakukan kewajibannya sebagai orang tua yang melindungi, menyayangi anaknya. Memberikan dan mengajarkan hal positif kepada sang anak, memenuhi dan mengembangkan bakat dan minatnya.¹⁰

Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.¹¹

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bentuk represif, baik yang tertulis maupun tidak

⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Alumni, Bandung:2004, hal 59.

¹⁰ Ford v Ford, "Parent and Child", Barbara D Ford, Cite as 83 S.Ct. 273, 1962, "Jurnal West Law", diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Tranding, Medan:2009, hal 159.

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Semua harus bisa bekerjasama dalam melindungi setiap anak-anak.¹²

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Hak Asuh (Hadhanah) adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁴
2. Anak Dibawah Umur yaitu, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapat suatu perlindungan hukum.¹⁵

¹² Farrah L Diddur, "Petitioner's Response To Order To Show Cause And Informational Brief On The Hague Convention On The Civil Aspect Of International Child Abduction", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹³ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta:2001, hal 18.

¹⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta:2006, hal 293.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

3. Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu, pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden yang berdomisili di Kota Pekanbaru.¹⁶
4. Orang Tua Laki-Laki yaitu, ayah dari seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial yang harus melindungi, menyanggahi serta mendidik anaknya juga.
5. Kompilasi Hukum Islam yaitu, berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai macam buku ataupun tulisan mengenai suatu persoalan hukum islam.¹⁷

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Apabila penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu.¹⁸

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh orang tua laki-laki menurut kompilasi hukum islam ini di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah, Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Kota Pekanbaru,

Riau. Tempat penulis melakukan penelitian ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah, Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau.

b. Sampel

No	Tahun	2015	2016	2017
1	Hakim Yang Mengadili Perkara	3	3	3
2	Pihak Yang Mendapatkan Hak Anak Oleh Orang Tua Laki-Laki	1	-	-

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang menjadi:

- a) Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru di bagian Kepaniteraan Muda Hukum yang sesuai dengan permasalahan.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

¹⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama_Pekanbaru.

¹⁷www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kompilasi/

¹⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta:2006, hal 264

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Peraturan Presiden.
 - e. Yurisprudensi.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu: perundang-undangan, skripsi hukum perdata, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan skripsi penulis.
3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu: kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.
- 5) **Teknik Pengumpulan Data**
- a) Observasi, yaitu metode pengumpulan data setidaknya dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
 - b) Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
 - c) Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Penulis disini wawancara terstruktur, yaitu metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.
 - d) Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6) Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara

deskriptif dari data yang telah diperoleh. Metode berfikir yang dikaitkan penulis terhadap kasus ini yaitu metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut agama islam adalah sebagai berikut: “Perkawinan adalah sunnah nabi. Oleh karena itu, bagi pengikut yang baik mereka itu harus kawin. Selain mencontoh tingkah laku nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

1. Akibat Adanya Perkawinan

Akibat dari adanya suatu perkawinan, maka dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun masalah yang menonjol dan juga

¹⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta:2014 hal 17.

cukup penting adalah masalah hubungan suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak serta masalah harta benda.²⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 2 sebagai berikut: *“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua,tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”*. (An-Nisa:3)

b. Dalil As-Sunnah

Diriwiyatkan dari Abdullah bin Mas-ud r.a dari Rasulullah yang bersabda, *“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya* (H.R. Bukhari Muslim).

C. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa : *“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

3. Syarat-syarat Perkawinan

²⁰ Adelle Couiwh, “Marriage Of The State” Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 2 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.²¹

Syarat perkawinan terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Syarat perkawinan yang bersifat materiil;
- b. Syarat perkawinan secara formal.

4. Putusnya Perkawinan

1. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan putusnya perkawinan dapat disebabkan karena²² :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan pengadilan.

2. Alasan-alasan Perceraian

Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat dibawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

B. Pengertian Umum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Permata Indonesia, Jakarta:2013, hal 33.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media Group, Bandung:2015, hal 56.

Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.²³

Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami isteri bercerai dan memiliki anak yang masih dibawah umur (mumayyiz). Sebab ketika pun kedua orang tua bercerai, anak harus tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua mereka, memerlukan penjaagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan. Inilah yang dimaksud dengan perwalian.²⁴

1) Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadanah)

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah.²⁵

Di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata:

“Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, “engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain”.

Bahkan dalam hadist yang lain, Rasulullah mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya. Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya

²³ Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta:1998, hal 235.

²⁴ Ibid.

²⁵ Khaliq Al-Hassan, Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita, Tiga Serangkai, Jakarta:2014, hlm 98.

Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”.

Tampaknya teks-teks suci dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, selama si anak belum balig dan belum menikah dengan lelaki lain. Alasannya bisa dilihat pada pernyataan Abu Bakar Siddiq dibawah ini²⁶ :

“Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun , lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya”.

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum mummayyiz tersebut adalah dari pihak istri.²⁷ Senada dengan penjelasan Masdar, menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih sangat amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti daripada ayahnya.

Disamping itu, ibu tugasnya tersebut dibanding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan. Namun sekali lagi penting dicatat, keunggulan ibu tidak diperlakukan untuk selamanya. Ini berlaku untuk anak-anak yang belum mumayyiz.²⁸

2) Syarat-syarat Hak Asuh Anak (Hadanah)

a. Syarat pertama dan kedua, berakal dan telah baligh, sebab kelompok ini masih

²⁶ Qomaruddin Awwam, Fiqih Wanita Pedoman Rumah Tangga dan Pendidikan Anak, Cerdas Interaktif, Bandung:2012, hal110.

²⁷ Masdar Farid Mas’Udi, Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, Mizan, Bandung: 2007, hal 151.

²⁸ Muhammad Bagir Al Habsyi, Fikih Praktis Menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Mizan, Bandung:2002, hal 237.

memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuh mereka.²⁹

- b. Syarat kedua, agama yang mengasuh haruslah sama dengan agama anak yang diasuh, sehingga orang kafir tidak berhak mengasuh anak Muslim.
- c. Syarat ketiga, mampu mendidik, sehingga orang yang buta, sakit, terbelunggu dan hal-hal lain yang dapat membahayakan atau anak disia-siakan maka tidak berhak mengasuh anak.
- d. Syarat keempat, ibu kandung belum menikah lagi dengan lelaki yang lain, berdasarkan sabda rasulullah: *“Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah lagi” (Hasan Ditakhrij oleh Abud Dawud 2244 dan An-Nasa’i 3495)*

3) Pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak (Hadanah)

1. Ibu adalah wanita yang paling berhak mengasuh anak.

Jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak daripada laki-laki, maka -sesuai ijma ulama- ibu kandung sianak tentu lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perpisahan (antara suami dan istrinya), baik karena talak, meninggalnya suami atau suami menikah dengan wanita lain,

2. Urutan orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu kandung.

Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:

1. Ibu kandungnya sendiri
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan (kakak perempuan)
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan saudara perempuan
7. Anak perempuan saudara laki-laki

²⁹ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis, Aqwam, Jakarta:2015, hal 27.

8. Bibi dari pihak ayah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Laki-laki Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Penerapan pemberian hak asuh anak ialah suatu perbuatan dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu kepentingan untuk mendapatkan merawat, mendidik seseorang yang belum mummayiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.³⁰

Hadanah atau biasa dengan hak asuh merupakan suatu kewajiban orang tua baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³¹

Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan hal 2 yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu Kompilasi Hukum Islam malah menanganu tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayyiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.³²

³⁰ Amiur Nuruddin, Loc.Cit.

³¹ Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta:2013, hal 97.

³² Andi Syamsu, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Prenada Media Group, Jakarta:2008, hal 2.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 10 hanya dijelaskan mengenai anak asuh. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

2. Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Laki-Laki Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hukum Pemohon(in person) selalu hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan dengan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Sejauh ini Pengadilan Agama Pekanbaru belum ada menerapkan secara khusus mengenai hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Sebelum menjatuhkan putusan hak asuh anak pihak Pengadilan Agama Pekanbaru menimbang pada proses pembuktian dari pemeriksaan saksi-saksi, yang mana ayah dari sang anak memberikan kesaksian bahwa ayah dari sang anak dapat menyanggupi dalam segala kebutuhan pokok si anak, sedangkan dari pihak Ibu dianggap tidak mampu dalam memberikan kebutuhan dan tidak mencerminkan contoh yang baik dari seorang ibu. Dari kesaksian tersebut Hakim dapat mempertimbangkan dengan

keyakinannya bahwa hak asuh anak lebih berhak kepada ayahnya.³³

Tetapi ada beberapa sebab yang membuat sang ibu kehilangan hak asuh anaknya walaupun masih dibawah umur, bisa karena sang ibu tidak memperdulikan anaknya dalam keadaan apapun, tidak merawat dan menjaga anaknya sebaik mungkin, melakukan tindakan kekerasan dan mengabaikan segala kebutuhan sang anak.³⁴

Hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan untuk menguasai. Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak memperbolehkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut. Pengadilan pun bisa memutuskan jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh pihak ayah.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Anak Kepada Orang Tua Laki-Laki Berdasarkan Putusan No 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr

1. Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak

Di dalam Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr telah diputuskan mengenai hak asuh anak dibawah umur yang jatuh ke pihak orang tua laki-laki. Dimana seharusnya anak dibawah umur berada di bawah asuhan ibunya, sebagaimana ditentukan:

Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai hak

³³ Wawancara dengan Bapak Barmawi, Selaku Humas Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 13 November 2017, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Barmawi, Selaku Humas Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 13 November 2017, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru

asuh anak dibawah umur yang jatuh ke orang tua laki-laki, yaitu dimana bisa aja orang tua laki-laki tersebut lebih hubungan lebih erat dan dekat dengan anaknya yang masih dibawah umur.

Hakim berpendapat bahwa pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur bisa saja ke orang tua laki-laki, apabila dalam persidangan pihak laki-laki dapat memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi pada saat masih terlaksananya perkawinan mereka, seperti pihak perempuan sering menelantarkan anaknya, tidak mengurus dan tidak memperdulikan sang anak, pihak perempuan kerap melakukan tidak kekerasan terhadap anaknya, pihak perempuan pindah agama (murtad), pihak perempuan berselingkuh dan kerap mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap anak dibawah umur.³⁵

Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai hak asuh anak dibawah umur yang jatuh ke orang tua laki-laki, yaitu dimana bisa aja orang tua laki-laki tersebut lebih hubungan lebih erat dan dekat dengan anaknya yang masih dibawah umur. Hakim berpendapat bahwa pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur

bisa saja ke orang tua laki-laki, apabila dalam persidangan pihak laki-laki dapat memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi pada saat masih terlaksananya perkawinan mereka, seperti pihak perempuan sering menelantarkan anaknya, tidak mengurus dan tidak memperdulikan sang anak, pihak perempuan kerap melakukan tidak kekerasan terhadap anaknya, pihak perempuan pindah agama (murtad), pihak perempuan berselingkuh dan kerap mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Hakim mempertimbangkan karena dengan alasan khawatir anak akan ditelantarkan oleh ibunya dan juga khawatir anak tersebut akan meniru perilaku ibunya sedangkan sang anak masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang sedangkan anak tersebut masih dibawah umur, ayahnya sudah terbiasa mengurus anaknya dan pada Pasal 105 (a) kompilasi hukum islam “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” tidak berlaku mutlak namun yang penting adalah kemaslahtan untuk anak itu sendiri. Sedangkan ibu dari anak tersebut juga tidak pernah menghadiri panggilan untuk menjalani sidang mengenai hak asuh anak yang diminta oleh ayahnya.

2. Penetapan Putusan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Pada putusan Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr dimana hak asuh yang masih dibawah umur jatuh ke orang tua laki-laki atau ayahnya. Penetapan putusan hak asuh anak ini mempunyai dasar pertimbangan hakim yang cukup kuat. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa si ayah dari anak tersebut sudah terbiasa mengurus anaknya dan pada Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak

³⁵ Wawancara dengan Bapak Abu Thalib Zisma Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 13 November 2017, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

ibunya” tidak berlaku mutlak namun yang penting adalah kemaslahatan untuk anak itu sendiri.

Majelis hakim juga menilai dari apa yang dikatakan ayah anak tersebut dan mendengar penjelasan dari beberapa pihak bahwa sang ibu sering keluar malam dan jarang pulang, sering tidak memperdulikan anaknya, panggilan dipersidangan pun tidak pernah terpenuhi untuk memperjuangkan hak asuh anaknya tersebut sehingga membuatnya kehilangan hak asuh anaknya sebagai ibu.³⁶Hak asuh anak yang jatuh ke ayahnya karena takut akan anak tersebut meniru perilaku ibunya yang tidak baik dan memberikan dampak buruk pada akhirnya.

A. Hak dan Kewajiban Anak Dibawah Umur Yang Harus Dipenuhi Oleh Orang Tua Yang Telah Bercerai

1. Hak Asuh Anak Oleh Undang-Undang

Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa Pasal. Diantaranya Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat

fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dan juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut penulis, hak asuh anak dibawah umur akan diberikan kepada orang tua yang mampu menjaga, merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang serta contoh yang baik bagi si anak tersebut. Walaupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun dilihat dari sisi lain jika sang ibu tidak mampu merawat, menelantarkan, memberikan contoh yang buruk atau hal yang lainnya maka hak asuh bisa saja tidak diberikan kepadanya.

Hak asuh yang diberikan kepada ayahnya karena sang ayah lebih mampu merawat, menjaga dan melindungi serta lebih dekat dengan anak tersebut yang selalu memperhatikan kondisi anaknya tersebut. Tetapi tetaplah kedua orang tua selalu memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut agar anak tersebut menjadi anak yang penuh kasih sayang dan tidak merasa kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Barmawi, Selaku Humas Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 13 November 2017, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Hak Anak Dibawah Umur

Dalam wawancara antara penulis dengan Bapak Andri, Orang Tua Laki-Laki Pemegang Hadhanah, mengenai apakah hak anak dibawah umur sudah dipenuhi oleh orang tua yang telah bercerai, yaitu:

- 1) Hak anak yang masih dibawah umur sudah dipenuhi oleh ayah kandungnya seperti hak atas perlindungan baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan yang merugikan diri anak dan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.³⁷
- 2) Hak untuk berekreasi dan bermain juga diberikan kepada anaknya untuk masa kanak-kanak identik dengan asyiknya bermain, bermain juga anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Hak anaknya tersebut sudah terpenuhi sebagaimana seharusnya dilakukan orang tua terhadap anaknya.³⁸

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan ibu Sri Wahyuni, ibu kandung dari anak yang bersangkutan, apakah hak dan kewajiban yang ia berikan kepada anaknya sudah terpenuhi, hak anak tersebut ia sudah penuhi sama seperti hal yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu :

- a. Walaupun sudah berpisah dengan ayah sang anak tersebut sang ibu tetap memperhatikan dalam hal pendidikan dan memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anaknya, mengajarkan dan mendapatkan pengetahuan yang baik.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Bapak Andri, Orang Tua Laki-Laki Pemegang Hadhanah, 2 Desember 2017, Bertempat di kediaman beliau Jalan Hang Jebat III, Sail.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Andri, Orang Tua Laki-Laki Pemegang Hadhanah, 2 Desember 2017, Bertempat di kediaman beliau Jalan Hang Jebat III, Sail.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Ibu dari Malfa Lia Sherina, 5 Desember 2017,

- b. Sang ibu memberikan kasih sayang tanpa kekurangan untuk menjaga kebahagiaan anaknya tersebut, kewajiban anak tersebut menyayangi orang tua dan mendengarkan nasihat orang tuanya.

Menurut penulis kedua orang tua yang telah bercerai tetap bekerja sama, kompak dalam mengurus ataupun mengasuh anak mereka, terlebih anak tersebut masih dibawah umur yang memang sangat perhatian dari kedua orang tuanya. Kewajiban ayah untuk menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelajaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. a) Penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur oleh orang tua laki-laki di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia

Bertempat di kediaman beliau Jalan Makmur, Bukit Raya.

dapat memilih diantara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

b) Tetapi ada beberapa sebab yang membuat sang ibu kehilangan hak asuh anaknya walaupun masih dibawah umur, bisa karena sang ibu tidak memperdulikan anaknya dalam keadaan apapun, tidak merawat dan menjaga anaknya sebaik mungkin, melakukan tindakan kekerasan dan mengabaikan segala kebutuhan sang anak.

2. Dari data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru, sebelumnya tidak ada satupun putusan yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada orang tua laki-laki selain putusan di Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Hal ini di karenakan pertimbangan hakim dalam pengasuhan anak dan melihat keseriusan antara kedua orang tuanya dalam pengasuhan anak.

3. Hak dan kewajiban anak dibawah umur telah dipenuhi oleh kedua orangtuanya meskipun telah bercerai dan bersama-sama memperhatikan pertumbuhan anaknya. Perlindungan anak dalam fungsi keagamaan, didasari oleh pemikiran kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan-perubahan sehingga harus mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang timbul dari perubahan-perubahan tetapi tetap dalm koridor keyakinan agama yang dianut. Hal ini juga terjadi pada keluarga dalam mengasuh anak-anaknya.

C. Saran

1. Anak harus dilindungi dan ditumbuh kembangkan dilingkungan yang baik. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

3. Orang tua yang telah putus atau bercerai harus tetap memperhatikan dan memberikan kasih sayang tanpa kekurangan kepada anaknya, terlebih anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orangtuanya. Agar anak tersebut tumbuh kembang dengan penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya meski telah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali, 2000, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Al-Hassan, Khaliq, 2014, Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita, Tiga Serangkai, Jakarta.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 2002, Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Mizan, Bandung.
- Alam, Andi Syamsu, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Pranada Media Group, Jakarta.
- Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, 2015, Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis, Aqwam, Jakarta.
- Annalisa Yahanan, Sri Turatmiyah, 2014, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Awwam, Qomarrudin, 2014, Fikih Wanita Pedoman Rumah Tangga dan Pendidikan Anak, Cerdas Interaktif, Jakarta.
- Baasyir, Ahmad Azhar, 2014, Hukum Perkawinan Islam, Media Pratama, Yogyakarta.
- Bahari, Adib, 2012, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Driyo, Agoes, 2004, Psikologi Perkembangan Remaja Mengenai Perkawinan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Farid Ma'udi, Masdar, 2007, Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, Mizan, Bandung.
- Faisal Salam, Moch, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Perkawinan Nasional, CV Zahir Tranding, Medan.
- Isna Wahyudi, Muhammad, 2014, Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan Dan Penerapan, Mandar Maju, Malang.
- Kamil, Ahmad, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi, 2013, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Grafika Utama, Bandung.
- Manaf, Abdul, 2012, Putusan Peninjauan Kembali Dalam Pekara Perceraian Dan Kewarisan, Mandar Maju, Malang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, Hukum Perdata Indonesia, Permata Indonesia, Jakarta.
- Muhwan Hariri, Wawan, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Mukhlis Sunaryo, H.Oyo, 2014, Pranata Sosial Hukum Islam, Refika Aditama, Yogyakarta.
- Nurrudin, Amir, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Nurrudin Amir, Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Pranada Media, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 2014, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Putu Samawati, Erna Wahyuningsih, 2008, Hukum Perkembangan Indonesia, PT Rambang, Palembang.
- Rafiq, Ahmad, 1998, Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ramulyo, Idris, 2004, Hukum Perkawinan dan Kewarisan, Alumni, Bandung.
- Syaifuddin, Muhammad, 2014, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, 2007, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, 2015, Hukum Perkawinan Islam, Prenada Media Group, Bandung.
- Thalib, Muhammad, 2007, Manajemen Keluarga Sakinah, Reka Sinar, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Umar Haris Sanjaya, 2015, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hakim Dalam Mومتuskan Hak Asuh Anak “, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lilik HS “Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak” Jurnal Konstitusi.
- Adelle Couiwh, “Marriage Of The State” Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 2 Januari 2018.
- Farrah L Diddur, “Petitioner’s Response To Order To Show Cause And Informational Brief On The Hague Convention On The Civil Aspect Of International Child Abduction”, Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 7 september 2017.
- Ford v Ford,” Parent and Child”, Barbara D Ford, Cite as 83 S.Ct. 273, 1962, “Jurnal West Law”, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 7 september 2017.
- Jhonson Hendrick “ Child Protection After Divorce”, Jurnal West Law, diakses melalui, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 2 Januari 2018.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
- D. Website**
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, diakses pada tanggal 11 Juni 2017
- www.defisinimenurutparaahli.com/pengertian-kompilasi/, diakses pada tanggal 11 juni 2017.
- www.aliranim.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat-hadhanah, diakses pada tanggal 09 Juni 2017.